

**ANALISIS DINAMIKA PERDAGANGAN INTERNASIONAL  
DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEBIJAKAN  
PERDAGANGAN PROTEKSIONISME AMERIKA SERIKAT**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (S-1) Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional*



**Disusun oleh:**

**MEITY ESTETIKA**

**07041281621181**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA  
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

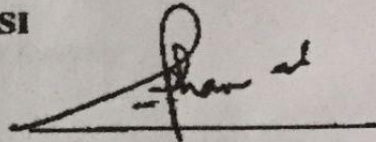
**ANALISIS DINAMIKA PERDAGANGAN INTERNASIONAL  
DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEBIJAKAN  
PERDAGANGAN PROTEKSIONISME AMERIKA SERIKAT**

**SKRIPSI**

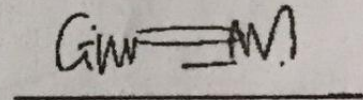
**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 2 Agustus 2021  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

**TIM PENGUJI SKRIPSI**

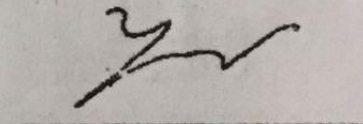
**H. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M., LL.D.  
Ketua**



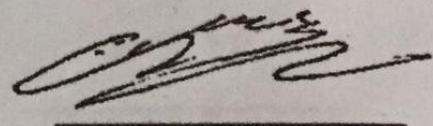
**Gunawan Lestari Elak, S.IP., M.A.  
Anggota**



**Muhammad Yustian Yusa, S.S., M.Si.  
Anggota**



**Muhammad Yusuf Abror, S.IP., M.A.  
Anggota**



**Indralaya, 17 September 2021**

**Mengembangkan,**

**Dekan**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Prof. Dr. Alfitri, M.Si.  
NIP. 196601221990031004**

**HALAMAN PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI**

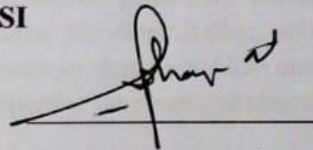
**ANALISIS DINAMIKA PERDAGANGAN INTERNASIONAL  
DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEBIJAKAN  
PERDAGANGAN PROTEKSIONISME AMERIKA SERIKAT**

**SKRIPSI**

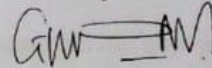
Telah memperbaiki skripsi dengan petunjuk dari Tim Penguji dalam Sidang Ujian Skripsi sebagaimana tertulis dalam “Hasil Ujian Skripsi” pada tanggal 17 September 2021 Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

**TIM PENGUJI SKRIPSI**

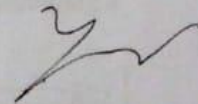
H. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M., LL.D.  
Ketua



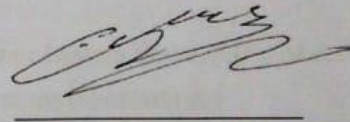
Gunawan Lestari Elake, S.IP., M.A.  
Anggota



Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si.  
Anggota



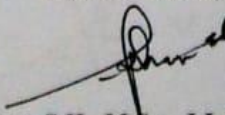
Muhammad Yusuf Abror, S.IP., M.A.  
Anggota



Indralaya, 17 September 2021

Mengetahui,

Ketua Jurusan,



H. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M., LL. D.  
NIP. 196504271989031003



## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MEITY ESTETIKA

NIM : 07041281621181

Program Studi : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Analisa Dinamika Perdagangan Internasional dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Perdagangan Proteksionisme Amerika Serikat” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak mana pun.

Indralaya, 5 Juli 2021

Yang membuat pernyataan



Meity Estetika

07041281621181

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas segala rahmat, nikmat, kasih sayang serta kemudahan dan berkah yang selalu Allah beri kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Dinamika Perdagangan Internasional Dan Penaruhnya Terhadap Kebijakan Perdagangan Proteksionisme Amerika Serikat.” Shalawat teriring salam tak lupa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai contoh sempurna akhlak manusia. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan kali ini, izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan hingga penyelesaian skripsi ini, terutama kepada:

1. Dr. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M., LL.D. selaku Dosen Pembimbing I dan Pak Gunawan Lestari Elake, S.IP., M.A. yang telah begitu banyak meluangkan waktu, memberikan masukan, semangat, ilmu, kritik, saran hingga solusi serta begitu sabar dalam menghadapi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Mama Lindawati serta kedua adik Denovan dan Randy, sebagai satu-satunya motivasi dalam penulisan skripsi ini.
4. Segenap civitas akademika Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Sriwijaya baik tenaga dosen, staf administrasi maupun mahasiswa. Terkhusus seluruh mahasiswa angkatan 2016 Indralaya yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Indralaya, Juli 2021

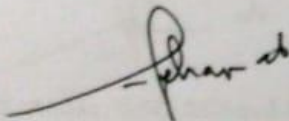
Penulis

## INTISARI

Sejak tahun 2018, Amerika telah mengambil beberapa kebijakan perdagangan yang bersifat proteksionisme. Beberapa di antaranya adalah diberlakukannya tarif impor aluminium dan pencabutan status GSP beberapa mitra dagangnya. Amerika Serikat sebagai salah satu negara perintis pembentukan WTO yang bertujuan untuk memfasilitasi liberalisasi perdagangan dunia justru mengambil kebijakan yang berlawanan dengan prinsip perdagangan bebas. Teori yang digunakan adalah Teori Kestabilan Hegemoni yang menjelaskan bahwa negara hegemon seperti Amerika Serikat akan mengambil kebijakan berdasarkan kepentingannya sendiri, dan konsep yang digunakan adalah Nasionalisme Ekonomi yang menggambarkan bentuk kebijakan perdagangan proteksionis yang diambil oleh Amerika Serikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menyebabkan Amerika Serikat mengambil kebijakan perdagangan proteksionis dengan melihat faktor-faktor yang ada dalam sistem perdagangan internasional. Penelitian ini juga bersifat eksplanatif dan menggunakan teknik analisis induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab Amerika Serikat mengambil kebijakan perdagangan proteksionis adalah karena mengalami kerugian perdagangan akibat adanya aturan pemberian perlakuan istimewa kepada negara berkembang dalam WTO. Aturan ini dimanfaatkan sebagai legitimasi oleh Tiongkok dalam kebijakan industri aluminiumnya yang merugikan industri aluminium Amerika Serikat serta India dalam kebijakan impornya yang menghambat akses pasar produk susu dari Amerika Serikat.

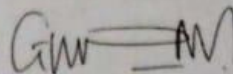
**Kata Kunci:** Amerika Serikat, Kebijakan Proteksionisme, Perdagangan Internasional.

**Dosen Pembimbing 1**



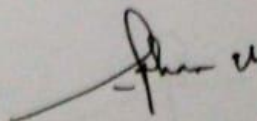
H. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M., LL.D.  
NIP. 196504271989031003

**Dosen Pembimbing 2**



Gunawan Lestari Elake, S.IP., M.A.  
NIP. 198405182018031001

**Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



H. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M., LL. D.  
NIP. 196504271989031003

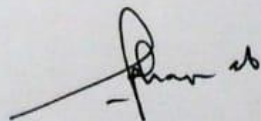


## ABSTRACT

Since 2018, the United States has adopted several protectionist trade policies. Some of them are the imposition of tariffs on aluminum imports and the termination of the GSP status of several of its trading partners. The United States as one of the pioneering countries in the formation of the WTO which aims to facilitate the world trade liberalization has imposed policies that are contrary to the principle of free trade. The theory used is the Hegemonic Stability Theory which explains that a hegemonic country such as the United States will undertake policies based on its own interests, and the concept used is Economic Nationalism which describes the form of protectionist trade policies taken by the United States. This study aims to find out what causes the United States to adopt protectionist trade policies by looking at the factors that exist in the international trade system. This research is also explanatory and uses inductive analysis techniques. The results of this research indicate that the reason why the United States has adopted protectionist trade policies is the trade losses due to the rules that give preferential treatment to developing countries in the WTO. This rule is used as a legitimacy by China in its aluminum industry policy which harms the aluminum industry in the United States and by India in its import policy that restricts market access for dairy products from the United States.

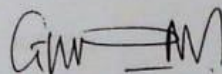
**Keyword:** International Trade, Protectionist Policy, The United States.

**Thesis Advisor I**



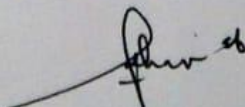
**H. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M., LL.D.**  
NIP. 196504271989031003

**Thesis Advisor II**



**Gunawan Lestari Elake, S.IP., M.A.**  
NIP. 198405182018031001

**Head of the International Relations Study Program**  
**Faculty of Social and Political Science**



**H. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M., LL. D.**  
NIP. 196504271989031003

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penulisan.....	8
1.4 Manfaat Penulisan.....	9
1.5 Kajian Pustaka.....	9
1.6 Landasan Teori.....	11
1.6.1 Kerangka Teori.....	11
1.6.1.1 Teori Kestabilan Hegemoni.....	11
1.6.1.1.1 Teori Kestabilan Hegemoni menurut Charles Kindleberger.....	12
1.6.1.1.2 Teori Kestabilan Hegemoni menurut Robert Keohane.....	13
1.6.1.1.3 Teori Kestabilan Hegemoni menurut Robert Gilpin.....	14
1.6.1.2 Konsep Nasionalisme Ekonomi menurut George Macesich.....	17
1.6.2 Teori Yang Digunakan Pada Penelitian Ini.....	19
1.6.3 Alur Pemikiran.....	21
1.7 Argumen Utama.....	22
1.8 Metode Penelitian.....	22
1.8.1 Desain Penulisan.....	22
1.8.2 Definisi Konsep.....	23
1.8.3 Fokus Penelitian.....	24



1.8.4 Unit Analisis.....	24
1.8.5 Jenis dan Sumber Data.....	25
1.8.6 Teknik Pengumpulan Data.....	25
1.8.7 Teknik Keabsahan Data.....	25
1.8.8 Teknik Analisa Data.....	26
BAB 2 KEBIJAKAN PERDAGANGAN PROTEKSIONIS AMERIKA SERIKAT.....	27
2.1 Kenaikan Tarif Terhadap Produk Impor Aluminium.....	27
2.2 Pencabutan Status Penerima Manfaat GSP Untuk India.....	36
BAB 3 PEMBAHASAN.....	42
3.1 Penyebab Kenaikan Tarif Impor Aluminium.....	42
3.2 Penyebab Dicabutnya Status GSP India.....	50
BAB 4 PENUTUP.....	56
3.1 Kesimpulan.....	56
3.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Lima negara penerima manfaat terbesar dalam program GSP AS 2014-2018 .....	3
Tabel 1.2 Ekspor negara pilihan dan kelompoknya serta persinya dari total ekspor dunia .....	4
Tabel 1.3 Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian.....	9
Tabel 1.4 Fokus Penelitian.....	24
Tabel 2.1 Smelter Aluminium AS yang tutup permanen sejak 2012.....	32
Tabel 2.2 Impor AS dari negara penerima GSP.....	38
Tabel 2.3 Kenaikan tarif impor AS dari India sebelum dan sesudah pencabutan GSP....	41

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur pemikiran.....	21
Gambar 2.1 Porsi pasar aluminium AS.....	30
Gambar 2.2 Produksi aluminium AS tahun 1970-2017.....	31
Gambar 2.3 Harga aluminium di pasar global 1998-2016.....	32
Gambar 2.4 Nilai perdagangan bilateral AS-India tahun 1990-2018.....	39
Gambar 3.1 Persentase ekspor Tiongkok dan AS terhadap total ekspor global.....	42



## DAFTAR SINGKATAN

AGOA	: <i>African Growth and Opportunity Act</i>
AS	: Amerika Serikat
ATPA	: <i>Andean Trade Preferences Act</i>
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CAC	: <i>Codex Alimentarius Commission</i>
CBERA	: <i>Caribbean Basin Economic Recovery Act</i>
DoC	: <i>Department of Commerce</i>
FAO	: <i>Food and Agriculture Organization</i>
G20	: <i>Group of Twenty</i>
GATT	: <i>General Agreement on Tariffs and Trade</i>
GSP	: <i>Generalized System of Preferences</i>
HST	: <i>Hegemonic Stability Theory</i>
MFN	: <i>Most Favored Nation</i>
OECD	: <i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
PDB	: Produk Domestik Bruto
S&DT	: <i>Special and Differential Treatment</i>
SPS	: <i>Sanitary and Phytosanitary</i>
USITC	: <i>U.S. International Trade Commission</i>
USTR	: <i>U.S. Trade Representative</i>
WHO	: <i>World Health Organization</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Sistem perdagangan internasional selama beberapa dekade terakhir bertumpu pada kerjasama multilateral yang diawasi oleh organisasi perdagangan internasional WTO (*World Trade Organization*). Kerjasama multilateral ini lahir sebagai upaya untuk merekonstruksi kembali perekonomian negara yang hancur akibat Perang Dunia II dimulai dengan perjanjian perdagangan GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) tahun 1948 yang kemudian terlembaga menjadi WTO pada tahun 1994 (Irwin, 1994: 1). Sebagai negara pemenang perang yang tidak mengalami kerusakan materiil langsung, Amerika Serikat (selanjutnya akan disingkat AS) menjadi promotor sekaligus donatur terbesar dalam pembentukan kerjasama liberalisasi perdagangan ini untuk mempercepat pemulihan ekonomi terutama negara-negara Eropa yang dulu menjadi mitra strategis dagangnya.

Dengan hadirnya WTO, negara anggota mendapat jaminan untuk bisa mengakses pasar luar terutama pasar negara maju seperti AS. Perekonomian internasional juga tumbuh membaik secara berangsur-angsur karena adanya kerjasama perdagangan. Namun perdagangan bebas juga memunculkan fenomena *free-rider* (Axelrod dan Keohane, 1985). Negara dikatakan sebagai *free-rider* jika negara tersebut mendapat keuntungan dari kelonggaran kebijakan perdagangan seperti potongan tarif dari kesepakatan perdagangan yang dilakukan oleh negara lain tanpa harus menanggung kerugian atau patuh pada kewajiban dalam kesepakatan tersebut. Fenomena ini semakin tak dapat dihindari karena adanya prinsip MFN (*Most Favored Nation*) sebagai salah satu pilar WTO. MFN memiliki

makna bahwa kebijakan perdagangan yang diberlakukan oleh salah satu negara anggota terhadap produk dari negara anggota lain harus berlaku juga untuk produk yang sama dari semua negara anggota WTO. Dampak dari fenomena ini akan lebih nyata dirasakan oleh negara dengan kapasitas ekonomi yang besar karena kemampuannya dalam memengaruhi harga pasar akan berpengaruh terhadap *free-rider* yang bergantung pada kesepakatan perdagangan yang dilakukan oleh negara lain (Ludema & Mayda, 2007: 2).

WTO juga memberikan perlakuan khusus kepada negara berkembang. Perlakuan khusus yang dimaksud biasanya dengan memberikan negara berkembang kelonggaran waktu lebih lama dalam implementasi aturan-aturan tarif WTO yang ketat dan rendahnya level kewajiban yang harus ditaati. Artinya negara berkembang bisa menikmati penghilangan tarif dan rintangan perdagangan yang sudah diterapkan lebih dulu oleh negara maju namun masih tetap bisa mempertahankan aturan-aturan proteksi perdagangannya. Hal ini diharapkan bisa membantu negara berkembang membangun *infant industry* dan diversifikasi basis industri domestiknya yang masih mengutamakan komoditas pertanian (Ornelas 2016: 1).

AS sendiri mempunyai beberapa program tarif preferensi yang diberikan kepada negara berkembang, yaitu GSP (*Generalized System of Preference*) yang bersifat unilateral, serta tiga program yang berbasis regional seperti CBERA (*Caribbean Basin Economic Recovery Act*), ATPA (*Andean Trade Preferences Act*), dan AGOA (*African Growth and Opportunity Act*). Skema GSP diadopsi oleh AS pada tahun 1976 berdasarkan Trade Act 1974 yang membebaskan pajak produk impor dari negara berkembang yang memenuhi syarat. Namun tidak semua produk mendapatkan pembebasan pajak dan negara berkembang juga wajib memenuhi syarat ketat yang diajukan oleh negara pemberi tarif preferensi. Berdasarkan Trade Act, negara yang tidak bisa masuk daftar program GSP AS



adalah negara komunis, merupakan anggota kartel internasional yang menyebabkan kerugian terhadap perekonomian dunia, memberikan preferensi kepada negara lain selain kepada AS, nasionalisasi terhadap investasi AS, tidak mematuhi putusan arbitrase, keterlibatan dalam aksi terorisme, pelanggaran hak pekerja, *child labour*, dll (Sec. 502, US Trade Act, 1974). Selain itu, ada beberapa kriteria yang juga menjadi penentu apakah negara tersebut layak masuk dalam daftar GSP AS yaitu keinginan untuk menjadi negara penerima manfaat, tingkat perkembangan ekonomi, apakah negara maju lain juga memberikan tarif preferensi GSP, tingkat perlindungan hak kekayaan intelektual, keterbukaan pasar, kebijakan perdagangan dan investasi serta perlindungan hak pekerja (Sec. 503(c), US Trade Act, 1974). Beberapa negara yang menjadi penerima manfaat GSP dari AS adalah Brazil, Rusia, Indonesia, Turkey, Afrika Selatan, India dan Thailand.

Tabel 1.1 Lima negara penerima manfaat terbesar dalam program GSP AS 2014-2018

(nilai ekspor dalam US juta dolar).

<b>Negara</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
India	4,476	4,622	4,747	5,766	6,347
Thailand	3,500	3,625	4,058	4,192	4,381
Brazil	1,906	1,944	2,198	2,512	2,511
Indonesia	1,690	1,682	1,792	2,031	2,239
Turkey	1,151	1,229	1,464	1,645	1,936

Sumber: USITC DataWeb ([dataweb.usitc.gov](http://dataweb.usitc.gov)).

Dengan berkurangnya hambatan perdagangan dari negara maju serta adanya insentif yang diberikan kepada negara berkembang, seiring waktu konsentrasi perdagangan global mulai berubah. Perdagangan dunia yang dulu didominasi oleh AS, Eropa, dan Jepang, kini bermunculan beberapa pemain baru seperti Tiongkok, Singapura, Korea

Selatan, dan India yang juga berkontribusi besar bahkan dalam beberapa hal hampir melampaui pemain besar. Ekspor dari negara berkembang tumbuh hingga mencakup hampir setengah dari ekspor dunia dengan dua pertiganya berasal dari 15 negara berkembang terbesar. Dapat dilihat di tabel di bawah bahwa persentase ekspor dari negara berkembang semakin bertambah. Di sisi lain, ekspor dari negara maju juga ikut bertambah namun tidak signifikan seperti negara berkembang, bahkan persentase porsi perdagangan dunia dari negara maju berkurang.

Tabel 1.2 Ekspor negara pilihan dan kelompoknya serta porsinya dari total ekspor dunia

No.	Negara	Nilai ekspor (dalam US miliar dolar)		Porsi dari total ekspor dunia (dalam %)		Kenaikan nilai ekspor dari 2000- 2017 (dalam %)
		2000	2017	2000	2017	
1.	Tiongkok	249.2	2,263.4	3.9%	12.8%	808.2%
2.	Korea Selatan	172.3	573.7	2.7%	3.2%	233.0%
3.	Hong Kong	202.7	550.3	3.1%	3.1%	171.5%
4.	Meksiko	166.4	409.4	2.6%	2.3%	146.1%
5.	Singapura	137.8	373.2	2.1%	2.1%	170.8%
6.	Uni Emirat Arab	49.8	313.5	0.8%	1.8%	529.1%
7.	India	42.4	299.2	0.7%	1.7%	605.9%
8.	Thailand	69.0	236.6	1.1%	1.3%	243.1%
9.	Arab Saudi	77.6	218.4	1.2%	1.2%	181.5%
10.	Malaysia	98.2	217.8	1.5%	1.2%	121.8%
11.	Brazil	55.1	217.8	0.9%	1.2%	295.1%

12.	Vietnam	14.5	214.3	0.2%	1.2%	1379.8%
13.	Indonesia	65.4	168.6	1.0%	1.0%	157.7%
14.	Turki	27.8	157.0	0.4%	0.9%	465.2%
15.	Afrika Selatan	30.0	88.8	0.5%	0.5%	196.3%
<b>Negara berkembang</b>		2,240.8	8,460.6	34.7%	47.8%	277.6%
1.	Uni Eropa	2,457.1	5,900.6	38.1%	33.3%	140.1%
2.	Jepang	479.2	698.1	7.4%	3.9%	45.7%
3.	Amerika Serikat	781.9	1,546.3	12.1%	8.7%	97.8%
<b>Negara maju</b>		4,215.4	9,246.1	65.3%	52.2%	119.3%
<b>Dunia</b>		6,456.2	17,706.7	174.3%	100.0%	100.0%

Sumber: WTO, <http://data.wto.org> (dikutip dari Gonzalez, 2019).

Sistem perdagangan internasional telah memberikan kesempatan kepada negara untuk menikmati manfaat dari perdagangan bebas dengan adanya keterbukaan pasar. Akibatnya persaingan antara produsen domestik dan asing semakin meningkat. Konsumen kini bisa membeli barang yang mungkin tidak tersedia di dalam negeri dan memiliki beragam pilihan dengan harga yang murah. Teknologi yang semakin berkembang pesat juga turut memiliki andil dalam mensejahterakan negara berkembang dengan menambah daya saing produknya agar lebih kompetitif dengan produk negara maju. AS sebagai negara dengan ekonomi yang besar bukan tidak kebal dengan ancaman ini. Persaingan yang meningkat menyebabkan merosotnya bisnis dan industri AS yang kurang produktif. Kesempatan ekonomi di luar negeri yang besar juga menyebabkan banyak industri AS memindahkan perusahaannya ke luar negeri demi penghematan biaya dan keuntungan yang lebih besar.



Kombinasi dari beberapa faktor di atas melahirkan kekuatan ekonomi baru di beberapa negara Asia dan merupakan tantangan bagi AS sebagai pemimpin hegemoni. Salah satu contohnya adalah Tiongkok yang masuk WTO tahun 2001 dan sekarang memiliki andil 10% dalam ekspor barang dan jasa global, persentase yang nyaris sama dengan yang dimiliki AS (WTO 2019). Posisi relatif ekonomi AS terus menurun pasca Perang Dunia II seiring dengan tumbuhnya perekonomian negara berkembang serta bertambah besarnya defisit neraca perdagangan AS. Performa industri dalam negeri AS yang menurun karena dihadapkan pada peningkatan persaingan produk asing menimbulkan tekanan besar agar ada perubahan dalam kebijakan perdagangan AS meskipun secara keseluruhan perekonomian AS berjalan dengan baik. Perubahan yang diusulkan meliputi proteksi dari barang impor, promosi ekspor yang lebih agresif, dan retaliasi terhadap pihak yang melakukan pembatasan barang impor dari AS. Defisit perdagangan yang besar menimbulkan kecurigaan pada negara yang dianggap mengambil keuntungan sepihak dari prinsip perdagangan bebas AS.

Sejak terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS pada 2016, beberapa kebijakan proteksionis telah diambil untuk melindungi perdagangan AS seperti pemberlakuan tarif impor aluminium dan baja hingga perang dagang dengan Tiongkok (Noland 2019). Kebijakan ini diambil setelah adanya laporan investigasi dari U.S. Department of Commerce (2018, 5) bahwa tingginya impor aluminium dan baja menyebabkan merosotnya industri baja dalam negeri dan karenanya mengancam keamanan nasional AS. Untuk menekan impor, Presiden AS memberlakukan tarif impor aluminium sebesar 10% dan 25% untuk impor baja mulai dari tanggal 23 Maret 2018 (The White House, 2020). AS juga mempermasalahkan negara yang jika diukur dari PDB per kapita, termasuk negara dengan pendapatan tinggi namun masuk ke kelompok negara berkembang. Contohnya seperti Brunei, Hong Kong, Kuwait, Makau, Qatar, Singapura, dan Uni Emirat

Arab. Beberapa yang lainnya bahkan merupakan anggota G20 dan OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) seperti Meksiko, Korea Selatan, dan Turki (The White House, 2019).

Alasan praktik dagang yang tidak adil membuat AS tidak hanya mendesak WTO untuk mereformasi sistem pembagian negara maju dan berkembang namun juga merevisi ulang kelayakan negara-negara penerima manfaat dari GSP AS. Berdasarkan US Trade Act 1974 Sec. 504 (a), presiden AS mempunyai kekuasaan untuk mencabut, menanggukhan atau membatasi program GSP kepada negara penerima. Pada tahun 2019, AS sudah mengeluarkan India dan Turki dari daftar negara penerima GSP. Saat masih menerima GSP, impor kendaraan dan suku cadang, perhiasan dan logam mulia, dan batu pahat dari Turki bebas masuk pasar AS tanpa pajak. Total nilai impor produk GSP dari Turki tahun 2017 mencapai 1.66 miliar dolar, atau sebesar 17.7% dari keseluruhan impor AS dari Turki.

Pemberlakuan tarif impor yang tinggi bukanlah hal yang pertama kali terjadi sepanjang sejarah AS. Salah satu yang sering dijadikan rujukan adalah tarif Smoot Hawley pada tahun 1930. Sekitar 900 jenis barang impor dikenakan tarif sebesar 40%-60%. Tarif ini juga diberlakukan bersamaan dengan mulainya krisis ekonomi global (*Great Depression*) pada akhir tahun 1929. Tujuannya adalah untuk melindungi petani dan pengusaha AS dari kompetisi impor dan meningkatkan pendapatan negara dari tarif tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah mendukung perdagangan bebas, sangat mungkin bagi mereka untuk mengorbankan manfaat perdagangan internasional untuk melindungi kepentingan masyarakatnya yang lebih mendesak (Evenett 2019: 537).

Kebijakan perdagangan yang kini diambil oleh AS bersifat sepihak dan cenderung proteksionis. AS sebagai negara yang terus mengampanyekan prinsip-prinsip perdagangan

bebas dan kerjasama multilateral untuk memperbaiki perekonomian dunia kini melindungi pasar domestiknya dengan menerapkan hambatan perdagangan bagi negara yang dianggap merugikan perdagangannya. Kerugian-kerugian ini bukan hanya karena negara lain secara agresif ingin mengambil keuntungan secara sepihak dari AS, namun ada faktor yang lebih sistemik dalam sistem perdagangan internasional sehingga kerugian tak dapat dihindarkan. Berangkat dari latar belakang ini, penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut faktor-faktor apa saja yang menyebabkan diberlakukannya kebijakan perdagangan proteksionis oleh AS dengan level analisis sistem.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Dengan fenomena yang telah dijabarkan di bagian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah penelitian yaitu, **“Bagaimana faktor-faktor dalam sistem perdagangan internasional mempengaruhi kebijakan perdagangan proteksionis Amerika Serikat?”**

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini ditujukan untuk memahami mengapa Amerika Serikat menerapkan kebijakan perdagangan proteksionis dilihat dari faktor-faktor eksternal yang ada di sistem perdagangan internasional.

#### 1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap perkembangan kajian studi dalam Ilmu Hubungan Internasional mengenai kebijakan perdagangan proteksionis Amerika Serikat dan penyebabnya.
2. Manfaat Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemecahan masalah bagi lembaga atau instansi terkait untuk menambah informasi atau menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan perdagangan negara dengan mitra dagang internasionalnya.

#### 1.5 KAJIAN PUSTAKA

Tabel 1.3 Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian

No	Penelitian Terdahulu	Keterangan
1	Nama Penulis	Pablo D. Fajgelbaum, Pinelopi K. Goldberg, Patrick J. Kennedy, Amit K. Khandelwal
	Judul	<i>The Return to Protectionism</i>
	Nama Jurnal	The Quarterly Journal of Economics Vol. 135, Issue 1, Hal. 1-55
	Tahun	2020 (Oxford University Press)
	Hasil Penelitian	Menganalisis dampak jangka pendek dari diberlakukannya kebijakan perdagangan proteksionis terhadap perekonomian AS
	Perbandingan	Penelitian sebelumnya membahas tentang analisis dampak dari kebijakan perdagangan proteksionis

		terhadap perekonomian AS, sedangkan pada penelitian ini akan membahas penyebab AS mengambil kebijakan perdagangan proteksionis.
2	Nama Penulis	Azza Bimantara
	Judul	<i>Donald Trump's Protectionist Trade Policy from the Perspective of Economic Nationalism</i>
	Nama Jurnal	Jurnal Hubungan Internasional Vol. 7, No. 2, Hal. 189-204
	Tahun	2019 (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
	Hasil Penelitian	Memaparkan bahwa kebijakan perdagangan proteksionis Donald Trump merupakan upaya untuk melindungi kepentingan nasional juga mengamankan kekuasaan politiknya di hadapan para konstituen dan tuntutananya
	Perbandingan	Penelitian sebelumnya menganalisis penyebab AS mengambil kebijakan perdagangan proteksionis dari level analisis domestik. Penelitian ini akan menganalisis kasus yang sama namun menggunakan level analisis sistem internasional.
3	Nama Penulis	Sang-Chul Park
	Judul	<i>U.S. Protectionism and Trade Imbalance between the U.S. and Northeast Asian Countries</i>
	Nama Jurnal	International Organisations Research Journal Vol. 3, No. 12, Hal. 76-100

Tahun	2018 (National Research University Higher School of Economics)
Hasil Penelitian	Memaparkan bahwa salah satu penyebab AS mengambil kebijakan perdagangan proteksionis adalah adanya ketidakseimbangan neraca perdagangan AS dengan Asia Timur dan dampaknya terhadap kerja sama ekonomi yang ada di Asia Timur
Perbandingan	Penelitian sebelumnya menganalisis penyebab dan dampak kebijakan perdagangan proteksionis AS terhadap Asia Timur, sedangkan pada penelitian ini hanya akan menganalisis penyebab dan tidak memfokuskan hanya pada regional tertentu saja.

## 1.6 LANDASAN TEORI

### 1.6.1 Kerangka Teori

#### 1.6.1.1 Teori Kestabilan Hegemoni (*Hegemonic Stability Theory*)

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan *Hegemonic Stability Theory* untuk melihat bagaimana sistem dan hegemon saling mempengaruhi satu sama lain. Tujuan dari teori ini secara umum adalah untuk menjelaskan perilaku dan kebijakan yang diambil oleh hegemon. Teori ini banyak digunakan untuk menjelaskan dinamika yang terjadi sebagai hasil dari interaksi antarnegara dalam sistem seperti perang, kerjasama perdagangan, dan kestabilan internasional.

#### 1.6.1.1.1 Teori Kestabilan Hegemoni menurut Charles Kindleberger

Perilaku hegemon dalam HST bisa dipahami dari bermacam perspektif Hubungan Internasional seperti liberalisme dan realisme. Charles Kindleberger merupakan salah satu ahli teori dalam perspektif liberalisme. Menurutnya, sistem akan berjalan dengan stabil jika terdapat satu negara yang bertindak sebagai stabilisator. Peran ini harus dipegang oleh hegemon sebagai negara dengan sumber daya dan kekuatan terbesar dalam sistem. Dalam konteks perdagangan internasional, liberalisme ekonomi akan tercapai jika didukung oleh hegemon yang mendukung prinsip-prinsip perdagangan bebas (Kindleberger 1973: 305).

Teori yang diajukan oleh Kindleberger menjelaskan bahwa kestabilan ekonomi internasional adalah *public goods* karena semua negara mendapatkan manfaatnya terlepas apakah mereka ikut berkontribusi untuk mendukung kestabilan tersebut. Negara kecil dan menengah cenderung tidak berkontribusi karena sadar dampaknya tidak akan seberapa terhadap keseluruhan sistem. Inilah sebabnya mengapa mereka bisa dengan mudah melakukan *free-ride* dengan mencari cara untuk mencapai kepentingan nasionalnya sendiri dan berharap negara lain yang lebih besar menanggung beban tersebut. Jika dunia hanya berisi negara kecil dan menengah, semua negara akan memiliki kecenderungan untuk melakukan hal tersebut dan karenanya kestabilan sistem akan sulit tercapai (Kindleberger 1981: 247). Hanya negara besar yang mempunyai sumber daya dan motivasi yang cukup untuk membuat aturan dan mampu mengajak negara lain mematuhi agar kestabilan sistem tercipta. Menurut Kindleberger, kestabilan sistem ekonomi internasional dapat tercapai jika lima syarat terpenuhi, yaitu keterbukaan pasar, pinjaman jangka panjang, sistem nilai tukar yang stabil, koordinasi kebijakan makroekonomi, dan adanya tempat peminjaman terakhir (*last resort*). Hegemon bertanggung jawab sebagai fasilitator dalam memenuhi lima syarat ini (Kindleberger 1973: 289). Dalam teori ini, Kindleberger lebih



menekankan pada perilaku hegemon yang lunak (*benevolent*) karena bertindak sebagai penyedia sekaligus stabilisator untuk sistem.

#### **1.6.1.1.2 Teori Kestabilan Hegemoni menurut Robert Keohane**

Hegemon menurut Robert Keohane (1984) merupakan pemimpin yang mendorong kerjasama antarnegara untuk meraih keuntungan bersama dalam kebijakan kolektif. Keohane berpendapat bahwa institusi atau rezim ekonomi internasional diperlukan untuk memfasilitasi ekonomi politik internasional agar efisien. Rezim internasional dapat mendorong tercapainya kepentingan bersama dibandingkan jika masing-masing negara hanya bekerja sendiri untuk memenuhi kepentingan nasionalnya semata. Hegemon akan mengajak negara lain bekerja sama untuk mengurangi biaya transaksi dan ketidakpastian serta membangun prospek interaksi ekonomi yang menguntungkan.

Dari perspektif liberal menurut Keohane ini, hegemon dilihat sebagai negara penjamin kerjasama internasional yang mampu menyelesaikan masalah dengan mendorong negara lain untuk mengambil kebijakan kolektif agar bisa menguntungkan semua pihak. Teori ini sangat bernuansa liberal karena hegemon harus memahami kepentingan bersama dengan negara lain, menyesuaikan posisi tawarnya (*bargaining position*), dan menginvestasikan sumber dayanya untuk mendirikan institusi internasional (Keohane 1984: 33-34). Pada tahun 1950-1960an misalnya, AS tidak memaksa negara lain untuk menerima aturan yang hanya memberikan sedikit keuntungan bagi mereka. AS melakukan upaya *joint policy efforts* di area yang memiliki kepentingan ekonomi bersama dengan negara lain serta memberikan insentif yang besar untuk menciptakan kerjasama. Terbukti hanya dalam rentang waktu lima tahun (1947-1962) AS menginisiasi enam negosiasi liberalisasi perdagangan multilateral.

Tatanan dan keteraturan dalam sistem disokong oleh satu negara kuat yang bertindak sebagai pemimpin yang disebut sebagai hegemon. Perkembangan ekonomi internasional pasca Perang Dunia II yang ditandai dengan munculnya *Pax Americana* oleh AS menyerupai *Pax Britannica* oleh Inggris pada abad ke-19. AS telah membentuk *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT, sekarang WTO), *International Monetary Fund* (IMF), *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD, Bank Dunia), *United Nations* (UN), *Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD), dan rezim internasional lainnya (Pahre, 1999: 4). Rezim-rezim inilah yang mendukung sistem perdagangan internasional yang berlandaskan perdagangan bebas.

#### **1.6.1.1.3 Teori Kestabilan Hegemoni menurut Robert Gilpin**

Dari perspektif realis, Robert Gilpin menyatakan bahwa hegemon merupakan negara yang menggunakan sistem untuk mencapai kepentingannya sendiri dan terkadang akan mengambil tindakan yang merugikan negara lain jika dirasa perlu. Hal ini dikarenakan prioritas utama hegemon adalah untuk memaksimalkan keuntungan ekonominya. Jika dalam dua teori kestabilan hegemoni sebelumnya hegemon akan bertindak sebagai penopang sistem demi menguntungkan semua negara di dalamnya sebagai tujuannya, maka dalam teori Gilpin, dampak positif yang sama bukan menjadi tujuan akhir namun hanya merupakan efek samping dari perilaku hegemon yang ingin memenuhi kepentingannya (Gilpin 1987: 73).

Gilpin (1981) mengelaborasi bagaimana distribusi kekuatan antarnegara dalam sistem mempengaruhi perubahan yang terjadi dalam politik internasional. Perubahan pada kekuatan dan kekayaan negara biasanya akan menyebabkan perubahan pula pada kebijakan luar negerinya. Negara akan selalu berusaha mengubah sistem sosial, politik, dan ekonomi

internasional agar bisa mencapai kepentingannya. Sebaliknya, sistem juga memiliki pengaruh terhadap bagaimana cara individu, kelompok, dan negara mencapai tujuannya dengan memberikan peluang dan tantangan dari interaksi entitas yang beragam di dalamnya. Hal ini sesuai dengan topik yang akan diangkat penulis sehingga penulis akan menggunakan teori dari Robert Gilpin untuk menganalisis penyebab AS memberlakukan kebijakan perdagangan yang proteksionis.

Meskipun bersifat anarki, tingkah laku negara dapat dipengaruhi oleh sistem. Perbedaan dalam distribusi kekuatan negara menentukan siapa yang mengatur sistem terlebih lagi kepentingan siapa yang diutamakan dengan berjalannya sistem. Negara dengan kekuatan politik, ekonomi, dan militer yang besar merupakan pihak yang mampu mendominasi dan memimpin dalam sistem dan biasa disebut sebagai negara hegemon. Hegemon menggunakan kemampuannya untuk mengatur proses interaksi berbagai elemen dalam sistem demi mencapai kepentingannya sendiri. Kemampuan hegemon dalam mempengaruhi sistem membuat negara-negara lain menyesuaikan kebijakan luar negerinya agar selaras dengan kepentingan atau nilai yang dipromosikan hegemon. Sebagai balasannya, hegemon menyediakan *public goods* agar negara lain mendapatkan manfaat dari sistem sehingga perdamaian dan kesejahteraan dapat terjaga.

*Public goods* yang harus tersedia jika ingin menerapkan sistem perdagangan internasional berlandaskan prinsip pasar bebas harus meliputi perekonomian internasional yang stabil, adanya otoritas perdagangan supranasional, penegakan hukum yang efektif, dll. Hegemon dengan kekayaannya mampu membiayai penyediaan *public goods* bagi komunitas internasional. Namun karena hegemon terus mempertahankan status quo demi kepentingannya sendiri, negara yang lebih kecil cenderung menikmati manfaat dari tersedianya *public goods* tanpa harus ikut membayar bagiannya secara adil (*free-riding*).

Dalam status quo, hegemon membutuhkan biaya untuk meningkatkan perkembangan ekonomi internalnya dan biaya ini akan semakin besar seiring dengan majunya perekonomian. Dari luar, pergeseran distribusi kekuatan yang berpotensi merugikan hegemon seperti meningkatnya jumlah dan kekuatan negara pesaing memaksa hegemon menggunakan sumber dayanya lebih banyak lagi untuk mempertahankan dominasinya. Besarnya biaya untuk mempertahankan status quo dan fakta bahwa hegemon cenderung membayar lebih banyak berarti seiring berjalannya waktu biaya ini akan meningkat lebih cepat dibandingkan keuntungan yang didapat dari status quo. Penurunan keuntungan memberikan beban finansial bagi hegemon yang jika tidak diatasi akan mempengaruhi posisi dominan hegemon dalam sistem.

Hegemon mengubah kebijakannya dalam dua cara untuk menyeimbangkan kembali keuntungan dan biaya status quo serta menghadapi negara pesaing. Yang pertama adalah menambah sumber daya yang bisa digunakan untuk mempertahankan komitmen dan posisi hegemon dalam sistem berupa kenaikan pajak dalam negeri dan penarikan biaya dari negara lain. Hegemon akan mengambil kebijakan inflasi atau memanipulasi kondisi perdagangannya dengan negara lain. Yang kedua adalah penghematan dengan mengurangi komitmen internasional dan pembiayaannya dengan cara yang tidak membahayakan posisi dominasinya. Contohnya adalah dengan menarik diri secara unilateral dari perjanjian atau komitmen internasional yang merugikan hegemon. Hegemon bisa melakukan penghematan jangka pendek setelah mengeluarkan biaya yang sangat besar sebelumnya. Kebijakan-kebijakan ini diharapkan bisa menarik kembali keuntungan kepada hegemon.

### 1.6.1.2 Konsep Nasionalisme Ekonomi menurut George Macesich

Pada bagian konsep, penulis menggunakan konsep nasionalisme ekonomi untuk menjelaskan kebijakan perdagangan yang diambil oleh AS. Kebijakan proteksionis AS merupakan respon dari kerugian-kerugian perdagangan yang dialaminya akibat faktor yang terjadi dalam sistem perdagangan internasional. Menurut Macesich (1985), nasionalisme ekonomi merupakan bentuk kebijakan diskriminasi negara dalam hal perdagangan terhadap produk dari negara lain demi kepentingannya sendiri. Konsep ini juga sering dikenal sebagai merkantilisme atau proteksionisme. Nasionalisme ekonomi bisa digunakan untuk menjelaskan jenis dan arah kebijakan perdagangan yang kini diambil oleh AS.

Nasionalisme ekonomi merupakan reaksi politik terhadap ketidakadilan sistem kapitalis berupa beberapa kebijakan yang merupakan intervensi negara terhadap aktivitas ekonominya. Para pendukung nasionalisme ekonomi biasanya akan mengkritik perdagangan bebas karena memberikan dampak buruk terhadap kondisi ekonomi dan sosial negara. Persaingan kepentingan ekonomi menjadi meningkat karena kompetisi dengan produk dari luar negeri (Macesich 1985: 27). Nasionalis ekonomi beranggapan sudah menjadi sifat alami dalam sistem bahwa negara akan saling bersaing untuk menguasai sumber daya ekonomi.

Nasionalis ekonomi menginginkan keseimbangan perdagangan dengan negara lain dan mengaitkannya dengan keamanan nasional. Dalam persaingan ekonomi antarnegara, nasionalis ekonomi lebih mementingkan keuntungan relatif terhadap negara lain (*relative gain*) dan mengesampingkan fakta bahwa masing-masing pihak mendapatkan keuntungan bersama (*mutual gain*). Bagi mereka, perdagangan adalah sebuah arena persaingan internasional di mana perekonomian yang saling bergantung akan memberikan rasa tidak aman karena kerentanannya terhadap tekanan ekonomi dan politik eksternal. Pada

dasarnya kebijakan nasional ekonomi diambil untuk melindungi ekonomi domestik dari tekanan eksternal tersebut. Kebijakan yang bersifat defensif ini biasanya muncul di negara maju yang mulai mengalami penurunan kekuatan ekonomi. Bentuk-bentuk kebijakan tersebut bisa berupa tarif, kuota, pembatasan sukarela (*voluntary export restraint*), maupun kebijakan lain yang sifatnya mendiskriminasi produk perdagangan dari negara lain (Macesich 1985: 23).

Nasionalisme ekonomi memfokuskan negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional untuk mencapai perkembangan ekonomi. Kegiatan ekonomi memiliki dampak terhadap kesejahteraan dalam negeri dan kedaulatan negara sehingga membutuhkan perhatian khusus. Interaksi politik kelompok domestik dapat mempengaruhi pasar sebagaimana pasar dapat mempengaruhi interaksi politik di dalam negara. Kebijakan luar negeri, tak terkecuali kebijakan ekonomi luar negeri, adalah hasil dari kontestasi kepentingan antara kelompok domestik yang dominan. Perdagangan proteksionis dan kebijakan yang bersifat nasionalis lainnya merupakan upaya untuk menambah bagian keuntungan yang mereka dapatkan dari aktivitas ekonomi.

Penjelasan di atas dapat diartikan bahwa meskipun nasionalisme ekonomi memberikan kuasa penuh pada negara untuk mengintervensi dan melindungi aktivitas ekonominya, kebijakan yang diambil merupakan bentuk dari kepentingan yang diperjuangkan kelompok domestik. Dukungan terhadap nasionalisme ekonomi tergantung pada kondisi ekonomi domestik dan kompetisi internasional yang sedang berlangsung (Macesich 1985: 39). Akibatnya, kepentingan-kepentingan ini tidak konstan dan akan terus berubah, sehingga kebijakannya juga bisa bervariasi di tiap negara seiring waktu. Hal inilah yang menjadikan nasionalisme ekonomi tetap dilihat sebagai pilihan alternatif kebijakan bagi para pemimpin negara di tengah liberalisasi perdagangan dunia.

### 1.6.2 Teori Yang Digunakan Pada Penelitian Ini

Dalam menganalisis penyebab AS memberlakukan kebijakan perdagangan proteksionis yang dilihat dari level sistem, penulis menggunakan Teori Kestabilan Hegemon (*Hegemonic Stability Theory*) menurut Robert Gilpin. Gilpin memiliki pandangan yang berbeda jika dibandingkan dengan teoriwan terdahulu seperti Charles Kindleberger dengan karakteristik hegemonnya sebagai stabilisator dan penyokong sistem serta teori dari Robert Keohane yang menitikberatkan hegemon sebagai aktor yang menginisiasi kerjasama untuk pembentukan institusi dan rezim internasional. Teori Gilpin memiliki perspektif realis karena menurutnya hegemon bertindak berdasarkan kepentingannya sendiri. Hegemon bisa saja mengambil kebijakan yang merugikan negara lain selama itu dirasa perlu untuk mencapai kepentingannya.

Di dalam bukunya yang berjudul *War and Change in World Politics*, Gilpin memfokuskan analisisnya pada struktur sistem di mana perubahan yang terjadi di dalamnya mempengaruhi perilaku negara-negara. Hegemon memiliki beberapa fase kehidupan yang dipengaruhi perubahan distribusi kekuatan tersebut. Dimulai dari awal mula hegemon muncul menjadi kekuatan dominan dalam sistem karena tidak ada negara lain yang mampu mengambil peran sebagai pemimpin dan penjamin kestabilan sistem. Setelahnya dilanjutkan dengan saat sistem berada pada *status quo*, masa di mana hegemon mempertahankan posisinya bersamaan dengan bertambahnya akumulasi kekuatan negara lain karena mendapat keuntungan dari sistem yang didukung oleh hegemon. Sampai ketika kekuatan hegemon akhirnya mampu ditandingi oleh negara pesaing yang bersiap untuk mengambil alih posisi dominasi melalui apa yang disebut Gilpin sebagai perang hegemoni (*hegemonic war*) untuk kemudian mengulang siklusnya dari awal lagi.



Sifat alami hegemon mulai muncul pada fase *status quo* dengan melakukan peninjauan ulang terhadap biaya-biaya yang selama ini dikeluarkan untuk menopang sistem. Hal ini dipicu oleh perubahan dalam sistem yaitu pergeseran distribusi kekuatan yang berpotensi merugikan hegemon seperti meningkatnya jumlah dan kekuatan negara pesaing. Hegemon menjadi lebih egois dan perhitungan karena harus mencari cara untuk tetap mempertahankan posisi dan keuntungannya yang mulai menurun di saat negara-negara lain mengalami pertumbuhan yang cepat dan berpotensi menjadi pesaingnya. Tanggung jawabnya untuk membiayai sistem tergantikan dengan kebutuhannya untuk mulai memikirkan kepentingannya sendiri sehingga kebijakan yang cenderung tidak bersahabat dengan negara lain pun diambil. Fase inilah yang menjadi alasan penulis menggunakan teori kestabilan hegemon dari Gilpin karena terdapat penjelasan mengenai perubahan dalam sistem yang mempengaruhi perilaku hegemon.

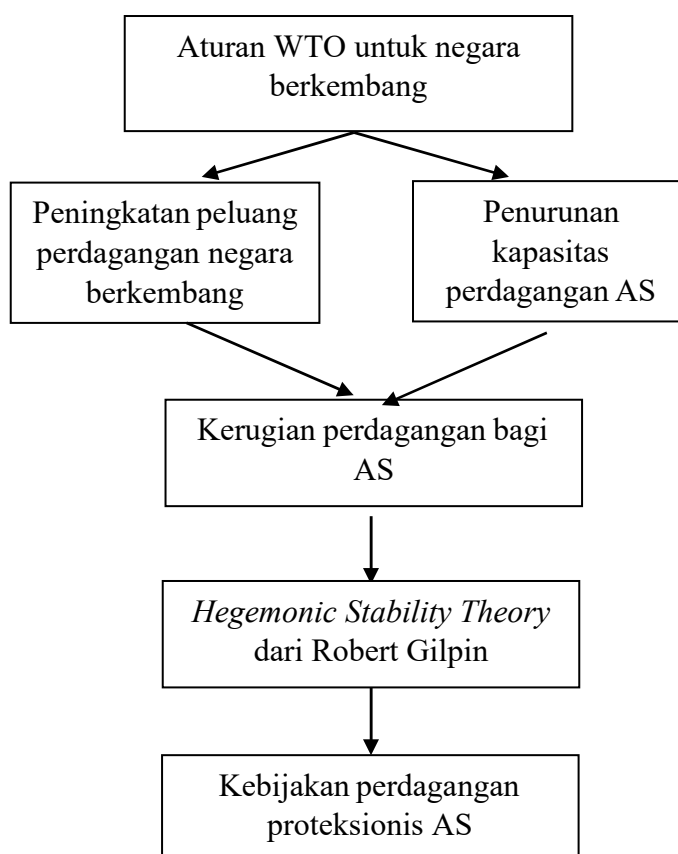
Prediksi Gilpin mengenai perilaku hegemon pada fase *status quo* yaitu memanipulasi kondisi perdagangannya dengan negara lain serta mengurangi komitmen internasional sebagai cara untuk mempertahankan posisi dominasinya cocok dengan beberapa kebijakan yang selama beberapa tahun terakhir telah diambil AS. Tidak hanya akibat, Gilpin juga menguraikan penyebab internal dan eksternal mengapa kekuatan hegemon mulai menurun pada fase *status quo*. Faktor eksternal tersebut adalah pergeseran distribusi kekuatan dalam sistem dan besarnya biaya mempertahankan posisi dominasinya. Penulis menggunakan faktor eksternal sebagai indikator karena dapat menjawab rumusan masalah penelitian untuk menganalisis bagaimana faktor dalam sistem mempengaruhi AS dalam mengambil kebijakan perdagangan proteksionis.

Penulis juga menggunakan konsep nasionalisme ekonomi menurut George Macesich untuk menggambarkan bentuk kebijakan perdagangan proteksionis yang diambil

oleh AS. Sesuai dengan penjelasan mengenai konsep ini di bagian sebelumnya, AS mengambil kebijakan tersebut sebagai bentuk intervensi terhadap kegiatan perekonomiannya. Intervensi dilakukan untuk melindungi ekonomi domestiknya dari tekanan eksternal yang merugikan AS. Sehingga dalam penelitian ini, teori kestabilan hegemon dari Robert Gilpin serta konsep nasionalisme ekonomi dari George Macesich cocok untuk digunakan dalam menganalisis kebijakan perdagangan proteksionis AS.

### 1.6.3 Alur Pemikiran

Gambar 1.1 Alur Pemikiran



## **1.7 ARGUMEN UTAMA**

Berdasarkan uraian latar belakang dan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis mengajukan hipotesis bahwa adanya peraturan WTO yang memberikan perlakuan istimewa kepada negara berkembang menyebabkan aturan ini sering dimanfaatkan oleh negara berkembang yang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi dan tidak seharusnya mendapat pengecualian konsekuensi perdagangan dengan negara maju. Pemanfaatan yang memberikan keuntungan secara sepihak menyebabkan kerugian bagi perdagangan AS. Sebagai upaya untuk menyeimbangkan keuntungan dan kerugian yang dialami, AS menggunakan posisi dan kekuatannya sebagai negara hegemon untuk mempengaruhi proses berjalannya sistem agar berjalan sesuai dengan kepentingannya. Secara unilateral, AS mengubah arah kebijakannya menjadi proteksionis guna melindungi industri dalam negeri dan perdagangan internasionalnya yang menghadapi persaingan dengan negara berkembang yang memanfaatkan aturan pengecualian dalam WTO.

## **1.8 METODE PENELITIAN**

### **1.8.1 Desain Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat eksplanatif (menjelaskan). Tujuannya adalah untuk menemukan faktor apa yang melatarbelakangi peristiwa yang terjadi. Penelitian eksplanatif berusaha untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan menemukan hubungan antara variabel. Dimulai dari kerangka pemikiran, hipotesis lalu dirumuskan untuk selanjutnya diuji melalui cara berpikir formal dan argumentatif.

## 1.8.2 Definisi Konsep

- a. Sistem perdagangan internasional: Perdagangan internasional merupakan pertukaran barang, jasa, dan modal antara negara-negara di dunia. Sistem perdagangan internasional memiliki bermacam bentuk hubungan dagang antarnegara di dalamnya seperti perjanjian unilateral, bilateral, regional, dan multilateral (McCulloch, 2012: 1). Organisasi perdagangan internasional kemudian dibuat untuk memperlancar hubungan dagang antara negara yang memiliki perbedaan kapasitas ekonomi, contohnya adalah WTO. Organisasi ini diperlukan untuk mendorong dan memfasilitasi kerjasama perdagangan.
- b. Stabilitas hegemoni: teori dari Robert Gilpin berfokus pada struktur sistem di mana perubahan yang terjadi di dalamnya mempengaruhi perilaku negara hegemon. Perubahan tersebut meliputi pergeseran distribusi kekuatan dalam sistem dan besarnya biaya mempertahankan posisi dominasinya. Hegemon akan beradaptasi dalam situasi ini dengan cara mengambil kebijakan yang memanipulasi kondisi perdagangannya dengan negara lain serta mengurangi komitmen internasional.
- c. Negara hegemon: Merupakan negara dominan yang memiliki kekuatan sangat besar untuk mengatur sistem dan negara di dalamnya. Dengan kekuatan militer dan kekayaannya yang besar, hegemon mampu mempengaruhi negara lain untuk mematuhi aturan sehingga kestabilan sistem tercipta. Hegemon juga memiliki peran yang berbeda dibandingkan dengan negara lain di dalam sistem, yaitu sebagai penyedia *public goods* seperti keamanan dunia serta kestabilan perdagangan dan ekonomi (Schenoni, 2018: 473).
- d. Nasionalisme ekonomi: Menurut Macesich, nasionalisme ekonomi merupakan bentuk kebijakan diskriminasi negara dalam hal perdagangan terhadap produk dari negara lain demi kepentingannya sendiri. Bentuk-bentuk kebijakan tersebut bisa

berupa tarif, kuota, pembatasan sukarela (*voluntary export restraint*), maupun kebijakan lain yang sifatnya mendiskriminasi produk perdagangan dari negara lain. Nasionalisme ekonomi bisa digunakan untuk menjelaskan jenis dan arah kebijakan perdagangan yang kini diambil oleh AS.

### 1.8.3 Fokus Penelitian

Tabel 1.4 Fokus Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator	Deskripsi
Analisis Dinamika Perdagangan Internasional dan Dampaknya Terhadap Kebijakan Perdagangan Proteksionisme Amerika Serikat	Perubahan dalam sistem perdagangan internasional	1. Pergeseran distribusi kekuatan dalam sistem	Munculnya kekuatan ekonomi baru karena aturan istimewa dalam WTO untuk negara berkembang
		2. Biaya dominasi ekonomi yang besar	Mempertahankan dominasi dari negara-negara pesaing serta biaya penyediaan <i>public goods</i> yang besar yang dimanfaatkan oleh <i>free-rider</i>

### 1.8.4 Unit Analisis

Penulis menggunakan negara sebagai unit analisis dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan penulis ingin meneliti faktor-faktor penyebab diberlakukannya kebijakan perdagangan proteksionis oleh AS.

### **1.8.5 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu data non numerik dan dideskripsikan dengan kata-kata yang didapatkan dari dokumen berupa buku, jurnal, laporan, dan surat kabar. Interpretasi dilakukan untuk memahami data dan menjelaskan hubungan yang terkait berkenaan dengan fenomena. Untuk sumber data, penulis menggunakan data sekunder yang bersumber dari website resmi instansi terkait serta buku, jurnal, dan website yang relevan dengan topik yang diteliti penulis.

### **1.8.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan atau *library research*. Teknik ini memungkinkan pencarian data karena memiliki sumber koleksi yang beragam untuk berbagai macam subjek (Young 1983: 188). Penulis menggunakan teknik ini karena kemudahannya dalam mencari data sekunder yang dibutuhkan. Kata kunci atau frase digunakan untuk mencari dan memilah data yang relevan dengan topik

### **1.8.7 Teknik Keabsahan Data**

Agar bisa memperoleh data yang valid, diperlukan pengujian keabsahan data. Penulis menggunakan teknik triangulasi data dalam penelitian ini. Triangulasi data merupakan teknik dengan melakukan pengecekan kredibilitas data dengan menggunakan sesuatu di luar data itu sendiri sebagai pembanding (Moleong 2002: 330). Menurut Sugiyono (2013: 273-275), penelitian setidaknya-tidaknya harus menggunakan triangulasi sumber untuk mencapai standar kredibilitas data. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara memeriksa data dari berbagai sumber dan metode. Analisis kemudian dilakukan berdasarkan data yang telah diperoleh dan ditarik kesimpulan.

### **1.8.8 Teknik Analisa Data**

Pada tahap analisis, penulis menggunakan teknik analisis induktif dengan mengumpulkan data kemudian dianalisa untuk dicari hubungannya dengan teori yang sudah dipaparkan. Generalisasi lalu ditarik sebagai kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada.



## DAFTAR PUSTAKA

- Analysis, T. W. (2018, June 14). *\$5 Billion in Exports at Stake as India Defends Religious Stance on Dairy Import, Medical Price Caps*. Retrieved from The Wire: <https://thewire.in/trade/what-india-is-telling-the-us-to-protect-5-billion-worth-of-exports>.
- Babu R.R. (2020). *On the Legality of the United States Action of Terminating India's GSP Status*. *Foreign Trade Review*, 55(1), 119-129.
- Barbieri, E., Di Tommaso, M. R., Tassinari, M., & Marozzi, M. (2019). *Selective industrial policies in China: investigating the choice of pillar industries*. *International Journal of Emerging Markets*.
- Bown, C. P. (2019, July 8). *Trump's Mini Trade War with India*. Retrieved from Peterson Institute for International Economics: [https://www.piie.com/blogs/trade-and-investment-policy-watch/trumps-mini-trade-war-india#\\_ftn3](https://www.piie.com/blogs/trade-and-investment-policy-watch/trumps-mini-trade-war-india#_ftn3).
- Brander, James and Spencer, Barbara, (1985), Export subsidies and international market share rivalry, *Journal of International Economics*, 18, issue 1-2, p. 83-100.
- C. Fred Bergsten, Charles Freeman, Nicholas R. Lardy, and Derek J. Mitchell. (2018, September). *China's Rise: Challenges and Opportunities*. Peterson Institute for International Economics.
- Congressional Research Service. (2021). *Generalized System of Preferences (GSP): Overview and Issues for Congress*. Congressional Research Service.
- CTI. (2009). *An Assessment of China's Subsidies to Strategic and Heavyweight Industries*. Washington: Capital Trade Incorporated.
- Evenett, S. J. (2019). *The Smoot–Hawley Fixation: Putting the Sino-US Trade War in Contemporary and Historical Perspective*. *Journal of International Economic Law*, 22(4), 535-555.
- Froman, M. B. (2014). *2014 Report on Sanitary and Phytosanitary*. Office of the United States Trade Representative.
- G. Moon. (2009). *Trade and Equality: A Relationship to Discover*. *Journal of International Economic Law*, 12.
- Gilpin, Robert. (1981). *War and Change in World Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gilpin, Robert. (1987). *The Political Economy of International Relations*. New Jersey: Princeton University Press.
- Gonzalez, A. (2019, March 12). *Bridging the Divide between Developed and Developing Countries in WTO Negotiations*. Retrieved from Peterson Institute for International Economics: <https://www.piie.com/blogs/trade-investment-policy-watch/bridging-divide-between-developed-and-developing-countries-wto>.

- Gourevitch, Peter. (1978). The second image reversed: the international sources of domestic politics. *International Organization*, 32, pp 881-912.
- Guillén, Arturo. (2019). USA's trade policy in the context of global crisis and the decline of North American hegemony. *Brazilian Journal of Political Economy*, 39(3), 387-407.
- Hammersley, M. & Atkinson, P. (2019). *Ethnography: Principles in Practice* (4<sup>th</sup> ed.). London: Routledge.
- Helleiner, E., & Pickel, A. (2005). *Economic Nationalism in a Globalizing World* (eds). London: Cornell University Press.
- Hoekman, B. (2004). Operationalizing the Concept of Policy Space in the WTO: Beyond Special and Differential Treatment. *Preparing the Doha Development Round – WTO Negotiators Meet the Academics* (pp. 1-23). Florence: European Centre for International Political Economy.
- Hwa, E. & Zou, Heng-fu. (2012). China: Preferential Tax Policy.
- Irwin, Douglas A. (1994). The GATT's Contribution to Economic Recovery in Post-War Western Europe. *NBER Working Paper #4944*. Cambridge: National Bureau of Economic Research.
- Ito, T. (1993). US political pressure and economic liberalization in East Asia. Dalam J. Frankel and M. Kauler (eds). *Regionalism and Rivalry: Japan and the United States in Pacific Asia* (h. 211-232). Chicago: University of Chicago Press.
- Kanungo, A. K. (2012). *China's Process of Accession to WTO: Obstacles and Challenges*. FREIT.
- Kapustina, Larisa & Lipková, Ľudmila & Silin, Yakov & Drevalov, Andrei. (2020). *US-China Trade War: Causes and Outcomes*. SHS Web of Conferences.
- Kennedy, U., Sharma, A., & Phillips, C. (2018). The Sheltering of Unwanted Cattle, Experiences in India and Implications for Cattle Industries Elsewhere. *Animals : an open access journal from MDPI*, 8(5), 64.
- Keohane, Robert. (1984). *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. Princeton; New Jersey: Princeton University Press.
- Kindleberger, Charles P. (1973). *The World in Depression: 1929-1939*. Berkeley: University of California Press.
- Kindleberger, Charles P. (1981). Dominance and Leadership in the International Economy: Exploitation, Public Goods, and Free Rides. *International Studies Quarterly*, 25(2), 242-254.
- Krugman, P. (1992), Does the New Trade Theory Require a New Trade Policy?. *World Economy*, 15: 423-442.
- Ludema, Rodney & Mayda, Anna M. (2006), The Free-Riding Effect of the MFN Clause: Evidence Across Countries. *Paper dipresentasikan di Ente Einaudi Research Seminar*.
- Macesich, G. (1985). *Economic Nationalism and Stability*. New York: Praeger.

- Martin, J. F. (2002). International Political Economy: Global and Domestic Interactions. Dalam I. K. Milner. *Political Science: State of the Discipline* (h. 118-146). New York: W. W. Norton.
- Mason, A. M. (2004). The Degeneralization of the Generalized System of Preferences (GSP): Questioning the Legitimacy of the U.S. GSP. *Duke Law Journal*, 54(2), 513–547. <http://www.jstor.org/stable/40040492>.
- McCann, Dermot. (2000). Economic Internationalization, Domestic Political Crisis and Corporate Governance Reform in Italy. *South European Society and Politics*, 5:1, 53-72.
- McCulloch, Rachel. (2012). The International Trading System and Its Future. *The Oxford Handbook of International Commercial Policy*.
- Moleong, L. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Mukhopadhyay, Abhijit & Sarma, Nandini. (2020). “US Trade ‘Realignment’: The Impact of GSP Withdrawal on India’s Top Exports to the United States,” *ORF Occasional Paper No. 233*, Observer Research Foundation.
- Müller, A. (2011). Special and differential treatment and other special measures for developing countries under the Agreement on Government Procurement: The current text and new provisions. In S. Arrowsmith & R. Anderson (Eds.), *The WTO Regime on Government Procurement: Challenge and Reform* (WTO Internal Only, pp. 339-376). Cambridge: Cambridge University Press.
- OECD Secretary-General. (1983). *The Generalized System of Preferences: Review of the First Decade*. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Ohlan, R. (2011). *Productivity and Efficiency Analysis of Haryana’s Dairy Industry*. *Productivity*, 52(1): 42–50.
- Ohlan, R. (2016). *Dairy Economy of India: Structural Changes in Consumption and Production*. *South Asia Research*, 36(2), 241-260.
- Ornelas, Emanuel. (2016). Special and Differential Treatment for Developing Countries. *CESifo Working Paper #5823*. Munich: Center for Economic Studies & Ifo Institute.
- Organisation for Economic Co-operation and Development Secretary-General. (1983). *The Generalised System of Preferences: Review of the First Decade*. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Page, P. K. (2005). *Special and Differential Treatment of Developing Countries in the World Trade Organization*. London: EGDI Secretariat.
- Pahre, R. (1999). *Leading Questions: How Hegemony Affects the International Political Economy*. Michigan: The University of Michigan Press.
- Pryke, S. (2012). Economic Nationalism: Theory, History and Prospects. *Global Policy*, 3:3, 281-291.
- PwC. (2014). *Worldwide Tax Summaries: Corporate Taxes 2014/15*. PwC.

- Sapir, A., L. Lundberg. (1984). "The U.S. Generalized System of Preferences and its Impacts," in R. Baldwin and A. Krueger (eds.) *The Structure and Evolution of Recent U.S. Trade Policy*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Schenoni, Luis (2018). The Argentina-Brazil Regional Power Transition. *Foreign Policy Analysis*, 14:4, 469-489.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tarr, David G.. (2000). *On the Design of Tariff Policy: A Practical Guide to the Arguments For and Against Uniform Tariffs*. Washington, DC.: World Bank.
- The White House. (2019, July 26). *Memorandum on Reforming Developing-Country Status in the World Trade Organization*. Retrieved from The White House: <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/memorandum-reforming-developing-country-status-world-trade-organization/>.
- The White House. (2020, January 24). *Proclamation on Adjusting Imports of Derivative Aluminum Articles and Derivative Steel Articles into the United States*. Retrieved from The White House: <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-adjusting-imports-derivative-aluminum-articles-derivative-steel-articles-united-states/>.
- The Wire Analysis. (2018, June 14). *\$5 Billion in Exports at Stake as India Defends Religious Stance on Dairy Import, Medical Price Caps*. Retrieved from The Wire: <https://thewire.in/trade/what-india-is-telling-the-us-to-protect-5-billion-worth-of-exports>.
- Trading Economics. (2021). *United States Steel Production*. Retrieved from Trading Economics: <https://tradingeconomics.com/united-states/steel-production>.
- Trefis Team. (2019, November 5). *Aluminum Prices: 15-Year Price Analysis And Production-Demand-GDP Dynamics*. Retrieved from Forbes: <https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2019/11/05/aluminum-prices-15-year-price-analysis-and-production-demand-gdp-dynamics/?sh=1d75fb581dad>.
- U.S. Census Bureau. (2017). *Trade in Goods with World, Seasonally Adjusted*. United States Census Bureau.
- U.S. Department of Commerce. (2018). *The Effect of Imports of Aluminium on the National Security*.
- UNCTAD, Proceedings, (Vol. IV 1964) 409.
- UNCTAD. 2018. *Trade and Development Report 2018*. UNCTAD.
- UNCTAD. (2020). *Non-Tariff Measures in Australia, China, India, Japan, New Zealand and the Republic of Korea: Preliminary Findings*. UNCTAD.
- United States International Trade Commission. (2019). *The Year in Trade 2018*. Washington DC: United States International Trade Commission.

- United States Trade Representative. (2017). *The 2017 Trade Policy Agenda And 2016 Annual Report Of The President Of The United States On The Trade Agreements Program*. United States Trade Representative.
- United States Trade Representative. (2019). *2019 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers*. United States Trade Representative.
- Weinhardt, Clara. (2020). Emerging Powers in the World Trading System: Contestation of the Developing Country Status and the Reproduction of Inequalities. *Global Society*, 34:3, 388-408.
- World Bank. (2013). *Commodity Market Outlook*. Global Economic Prospect.
- World Integrated Trade Solution. (2018). *India Exports to United States in US\$ Thousand 1990-2018*. Retrieved from World Integrated Trade Solution: <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/IND/StartYear/1990/EndYear/2018/TradeFlow/Export/Partner/USA/Indicator/XPRT-TRD-VL>.
- WTO. (2019). *World Trade Statistical Review 2019*. WTO.
- WTO ITC UNCTAD. (2018). *World Tariff Profiles 2018*. WTO ITC UNCTAD.
- Young, Heartsill. (1983). *ALA Glossary of Library and Information Science*. Chicago, IL: American Library Association.
- Yue, Qiang & Wang, Heming & Gao, Chengkang & Du, Tao & Liu, Liying & Lu, Zhongwu. (2015). Resources saving and emissions reduction of the aluminum industry in China. *Resources, Conservation and Recycling*, 104, 68-75.